

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang berada di kawasan Asia Tenggara. Diperkirakan dua-per-tiga dari wilayah Indonesia terdiri atas kawasan maritim, serta terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.<sup>1</sup> Berdasarkan luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam yang tersedia, Indonesia selayaknya dikategorikan sebagai kekuatan tengah, jika bukan negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara adidaya di kawasan Asia Tenggara dan sekitar Laut China Selatan.

Kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi laut dan pantai menempatkan Indonesia memiliki peranan penting sebagai negara kepulauan dan maritim. Indonesia memiliki empat posisi strategis, yaitu sebagai *strategic junction* pelayaran Internasional, sebagai *strategic fishing ground*, sebagai *strategic potential business*, dan sebagai *strategic key partner* bagi negara-negara besar.<sup>2</sup>

Namun demikian, kondisi ini acap kali mendapat ancaman berupa gangguan keamanan di laut Indonesia. Setidaknya terdapat empat potret masalah keamanan laut di Indonesia, yaitu kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan,

---

<sup>1</sup> Ministry of Maritime Affairs and Fishery dataset website  
<https://data.go.id/dataset/jumlah-pulau> (diakses 15 Maret 2017)

<sup>2</sup> Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M. Sc, "Tata Kelola Keamanan Laut Indonesia dalam Mendukung Program Pengembangan Poros Maritim Dunia", Pertemuan Forum Rektor Indonesia, USU, Medan (January 24<sup>th</sup>, 2015)

regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan.<sup>3</sup> Terkait dengan masalah kecenderungan keamanan laut, hingga saat ini masih terjadi aktifitas pencurian ikan (*illegal fishing*) dan sumber daya alam lainnya yang dapat mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain masalah sumber daya alam, diperparah pula dengan masih terdapatnya sejumlah masalah kekerasan di laut berupa pembajakan, perampokkan dan sabotase.<sup>4</sup>

Di antara permasalahan kemaritiman yang dihadapi Indonesia, salah satu urgensi pemerintah tertuju pada isu *illegal, unreported and unregulated fishing* yang disingkat IUU *Fishing*, atau secara gamblang nya dapat diartikan sebagai pencurian ikan. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, aktifitas pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah yurisdiksi Indonesia, jumlah kapal penangkap yang melebihi ketentuan, hasil tangkapan yang tidak dan disalah laporkan, merupakan bentuk-bentuk permasalahan terkait dengan IUU *Fishing*.<sup>5</sup>

Presiden Joko Widodo menyatakan dalam Simposium Kejahatan Perikanan Internasional II di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Yogyakarta, Senin (10/10 2016) bahwa: “*illegal fishing* telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang Indonesia”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Ida Kusuma, “*Indonesian Efforts in Combating IUU Fishing*”, ASEAN studies programe, The Habibie Center, Pada *Taking ASEAN on ASEAN Cooperation on Fisheries Management*, Jakarta. (Februari 2014)

<sup>6</sup> [Katadata.co.id/berita/2016/10/10/Jokowi-indonesia-rugi-rp-260-trilliun-akibat-pencurian-ikan/](http://Katadata.co.id/berita/2016/10/10/Jokowi-indonesia-rugi-rp-260-trilliun-akibat-pencurian-ikan/)

Permasalahan keamanan dan wilayah laut Indonesia secara tidak langsung memiliki korelasi dengan kredibilitas Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut.<sup>7</sup> Kredibilitas negara berhubungan langsung dengan kapabilitas negara itu sendiri, yang merupakan faktor internal, namun kredibilitas suatu negara pada akhirnya ditentukan dari perspektif negara lain terhadap kemampuan suatu negara. Termasuk di dalamnya kohesi politik nasional dan stabilitas ideologi, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, atau singkatnya kedewasaan dan kematangan sebagai suatu bangsa, besarnya kekuatan yang dimiliki, serta pengalaman dalam kepemimpinan bangsa.<sup>8</sup>

Di bawah rezim pemerintahan Joko Widodo, Indonesia berambisi untuk memainkan peran yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik. Salah satu indikator kunci dalam kampanye Jokowi di bawah kepresidenannya adalah penerapan kebijakan luar negeri untuk memperkuat peranan Jakarta sebagai '*Global Maritime Nexus*'.<sup>9</sup> Pada awal pemerintahannya Presiden Joko Widodo mengumumkan konsep baru yang dia beri nama '*Global Maritime Fulcrum*' sebagai pusat kebijakan administrasi kemaritimannya. Konsep ini secara fundamental merepresentasikan visi nasional dan agenda perkembangan dalam membangun kebudayaan kelautan negara Indonesia dan mengembangkan ekonomi kelautan. Konsep ini juga berperan sebagai doktrin strategi baru yang mencerminkan Indonesia sebagai suatu kekuatan maritim yang memiliki

---

<sup>7</sup> Muradi, "Penataan Kebijakan Keamanan Nasional", Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Bandung (January 2013)

<sup>8</sup> J. Soedjati Djiwandono, *The Role of Middle Power in the Pacific: The Role of Major Power and the Role of Indonesia as a Middle Power in Southwest Pacific* (Centre For Strategic and International Studies Jakarta, 1985)

<sup>9</sup> C. Sebastian, Leonard and Syailendra, Emirza Adi, "Jokowi's "Looks West" Foreign Policy: Expanding Indonesia's Sphere of Influence." RSIS Commentary, No. 207 (October 21<sup>st</sup>, 2014)

pengaruh diplomatik yang besar. Secara spesifik, administrasi pemerintahan Jokowi bertujuan untuk memainkan peran sebagai pusat kegiatan maritim di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.<sup>10</sup>

Meningkatnya fokus pemerintah terhadap isu maritim mulai membuahkan hasil. Witjaksono, *Chairman* – Komisaris Utama PT Dua Putra Utama Makmur, satu pemain besar di bidang kelautan, menyatakan bahwa kebijakan maritim yang diterapkan oleh pemerintah saat ini cukup terasa berdampak positif, terutama di kalangan nelayan dan pelaku sektor bisnis kelautan. Witjaksono meyakini bahwa iklim usaha yang positif ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kapal asing yang melakukan penangkapan secara ilegal di perairan Indonesia.<sup>11</sup>

Namun, di sisi lain, tidak pula dipungkiri bahwa terdapat dampak lain yang bersifat negatif terhadap pemberlakuan kebijakan maritim yang baru oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah negara seperti Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam, merupakan daftar – daftar negara yang telah mencicipi kebijakan keras pemerintahan Indonesia saat ini. Banyaknya jumlah kapal yang telah ditangkap dan diberikan sanksi tegas terkait *illegal fishing*, tentunya tidak begitu saja dibenarkan oleh negara-negara tetangga yang juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Sebagai dampak lanjutan, muncullah sentimen kedaulatan nasional dan kehormatan bangsa di lingkungan ASEAN, di mana isu ini masih tergolong isu sensitif.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Gindarsh, Iis & Priamarizki, Adhi, “Indonesia’s Maritime Doctrine and Security Concerns.” RSIS Policy Reports.

<sup>11</sup>Euis Rita Hartati, “Kebijakan Jokowi Untungkan Bisnis Maritim Indonesia”, Investor Daily

<sup>12</sup>Poltak Partogi Nainggolan, “Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI

Mulai bermunculannya dampak positif maupun negatif dari penerapan kebijakan baru ini sesungguhnya merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan maritim Indonesia yang baru. Peneliti menilai bahwa Indonesia sebagai salah satu negara maritim dan kepulauan yang memiliki potensi untuk menjadi besar melalui aspek maritim, sehingga menjadi penting bagi Indonesia untuk menetapkan kebijakan serta aturan yang tepat terkait isu IUU Fishing. Oleh karena itulah penulis melakukan penelitian terkait isu IUU *Fishing* dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam mencapai tujuannya untuk menjadi negara poros maritim, Indonesia diharapkan mampu merespon dan turut mencari solusi atas berbagai permasalahan keamanan maritim kawasan. Permasalahan keamanan maritim yang perlu mendapat perhatian adalah ancaman non-konvensional terutama pencurian ikan atau *illegal fishing*, yang secara langsung mengancam kredibilitas dan wilayah negara.

Penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan luar negeri poros maritim Jokowi dalam menangani permasalahan non-konvensional yang terjadi di wilayah perairan kawasan Asia Tenggara, yaitu permasalahan pencurian sumber daya alam, *illegal fishing*. Sebelum menilai tepat atau tidaknya kebijakan yang diterapkan saat ini, maka satu hal yang penting yang perlu dipertanyakan adalah, apakah baik masyarakat luas, negara tetangga, maupun pemerintah sendiri telah memahami

dengan baik implikasi kebijakan-kebijakan maritim yang diterapkan oleh Indonesia saat ini? untuk menjawab hal ini lah maka peneliti merasa perlu dilakukan suatu penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa kebijakan maritim yang diterapkan oleh pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana perumusan kebijakan poros maritim masa pemerintahan Joko Widodo dalam menangani permasalahan *illegal fishing* terhadap Indonesia di kawasan kelautan Asia Tenggara

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Meneliti dan menjelaskan mengenai kebijakan politik dan keamanan maritim di bawah administrasi presiden Joko Widodo.
2. Memperoleh gambaran mengenai penerapan kebijakan poros maritim dalam permasalahan *illegal fishing*.
3. Memperoleh gambaran mengenai dampak dari penerapan pemberantasan *illegal fishing* terhadap kondisi domestik maupun reaksi mancanegara.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan referensi dalam kajian terkait kebijakan dan keamanan wilayah kelautan, terutama kajian mengenai Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak (pemerintah dan masyarakat umum) untuk lebih memahami dan mendalami mengenai kebijakan maritim yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo.

### 1.6. Studi Pustaka

Perkembangan kondisi keamanan dan stabilitas maritim di kawasan Asia Tenggara, hingga hari ini telah memicu para peneliti sehingga menghasilkan jurnal-jurnal dan tesis-tesis yang membahas mengenai berbagai aspek terkait hal ini. Secara spesifik, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo juga memiliki peranan tersendiri dalam hal ini melalui implementasi berbagai kebijakan maritim yang tegas dan agresif.

Sebuah jurnal yang diterbitkan oleh *Singapore Institute of Southeast Asia Study* berjudul *Resource Issue and Ocean Governance in Asia Pacific: an Indonesian Perspective*<sup>13</sup>, menyatakan bahwa kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang secara umum dikenal karena dinamisme ekonomi dan keuntungan geostrategis-nya, merupakan wilayah yang rawan dan memiliki berbagai macam konflik, baik dalam level konflik dalam negeri maupun antar negara. Akhir dari era Perang Dingin yang diharapkan mampu mendamaikan kembali negara negara yang sempat terpecah dalam kubu, justru membangkitkan kembali persaingan tradisional di antara kekuatan-kekuatan di dalam kawasan dan mempertajam permasalahan teritori

---

<sup>13</sup> Dewi Fortuna Anwar, *Resource Issue and Ocean Governance in Asia Pacific: An Indonesian Perspective*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006)

dan perbatasan. Peningkatan kompetisi terhadap sumber daya alam semakin memperumit hubungan antar negara di dalam kawasan ini yang sedari awal sudah tidak stabil. Kebanyakan dari pertikaian antar bangsa di kawasan ini merupakan pertikaian maritim. Permasalahan ini disebabkan oleh dua faktor penentu. Faktor pertama ialah batas wilayah kelautan yang tidak pasti sebagai konsekuensi dari UNCLOS. Dan yang kedua adalah adanya kecenderungan terhadap eksploitasi terhadap sumber daya kelautan tanpa banyak pertimbangan mengenai yurisdiksi territorial.

Sebuah laporan tulisan mengenai kebijakan Jokowi mengenai doktrin kelautan dalam bentuk jurnal terbitan *Rajaratnam School of International Studies* berjudul *Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns*<sup>14</sup> menjabarkan bahwa dalam penerapan kebijakan luar negeri poros maritime pada era Jokowi memerlukan ketahanan kedaulatan, keamanan kelautan dan *regional security*. Dalam laporan ini juga menjelaskan mengenai dampak penerapan doktrin kelautan Jokowi terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan. Lebih lanjut dalam jurnal laporan ini juga dibahas mengenai tantangan strategis yang mungkin akan dihadapi Joko Widodo dalam masa pemerintahannya. Lebih lanjut jurnal laporan ini juga menganalisa mengenai korelasi antara doktrin kelautan Jokowi, penerapan kebijakan kelautan serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Tulisan selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebuah jurnal yang diterbitkan *CBDS Bina Nusantara University and Indonesian Association for*

---

<sup>14</sup> Gindarsah, Iis dan Priamarizki, Adi, "Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns", S.Rajaratnam School of International Studies



*International Relations* yang berjudul *Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific*<sup>15</sup>. Jurnal ini membahas bagaimana penerapan doktrin kelautan Jokowi dalam menghadapi perubahan strategi kawasan di Indo-pasifik, serta menganalisa pengaruh doktrin kelautan Jokowi terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai reformasi kebijakan pertahanan serta peningkatan pembiayaan militer Indonesia, bagaimana kerjasama luar negeri Indonesia dan keaktifannya dalam pembangunan institusi di kawasan Indo-pasifik.

Sebuah jurnal penelitian yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan berjudul *Maritime Axis Policy and Its International Implication*<sup>16</sup> membahas mengenai kebijakan maritim Jokowi serta implementasinya di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan poros maritim di bawah pemerintahan Joko Widodo dan respon negara lain terhadapnya yang mengungkap reaksi, argument, alasan, dan sikap yang berbeda.

Tulisan berikutnya merupakan sebuah buku elektronik (*e-book*) yang diedarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang berjudul **Kebijakan Kelautan Indonesia**<sup>17</sup>. Dalam buku ini dijabarkan dengan lengkap peta jalan kebijakan kelautan Indonesia, termasuk di dalamnya pilar

---

<sup>15</sup> Agastia, I Gusti Bagus Dharma dan Perwita, A. A. Banyu, "Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific", *Journal of ASEAN studies*, CBDS Bina Nusantara University and Indonesian Association for International Relation (2015)

<sup>16</sup> Nainggolan, Poltak Partogi, "Maritime Axis Policy and Its International Implications", Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI (2015)

<sup>17</sup> "Kebijakan Kelautan Indonesia", Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jakarta (2017)

kebijakan, kebijakan utama, strategi, prinsip serta dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia.

## 1.7. Kerangka Konseptual

### 1.7.1. Realisme

Realisme merupakan salah satu perspektif klasik dan paling diakui dalam Hubungan Internasional. Pandangan realisme dalam Hubungan Internasional hampir sama tua dengan 'Hubungan Internasional' itu sendiri. Sejak berakhirnya Perang Dunia I, kaum idealis mempercayai bahwa masyarakat sudah jenuh akan perang dan akan menghormati aturan hukum dan institusi-institusi yang stabil yang bisa menghadirkan seperangkat tatanan internasional. Namun kegagalan Liga Bangsa Bangsa dan pecahnya Perang Dunia II memunculkan pandangan yang lebih pesimis terhadap dinamika internasional yang bertentangan dengan konsep Utopianisme kelompok idealis. Realisme melihat negara, layaknya laki-laki pada fitrahnya egois dan mengejar kepentingan masing masing.<sup>18</sup> Machiavelli<sup>19</sup> berargumen bahwa tanggung jawab penguasa adalah selalu berupaya mencari keunggulan dan mempertahankan kepentingan negara dan menjamin kelangsungan negaranya.

Morgenthau<sup>20</sup> menekankan beberapa poin-poin penting dalam perspektif realisme terkait atas negara dan kepentingannya, yaitu: (i) Negara-negara berdaulat merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional; (ii) Negara-negara dimotivasi

---

<sup>18</sup> Jill Steans dan Lloyd Pettiford, "Dinamika Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema", ter. Deasy Silvy Sari, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2009)

<sup>19</sup> Nicolo Machiavelli, "*The Prince*", terj. Oleh P. Bondanella dan M. Musa, Oxford University Press, New York.

<sup>20</sup> Hans Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*", A.A. Knopf, New York. (1965)

oleh sebuah dorongan untuk kekuasaan serta mengejar ‘kepentingan nasional’; (iii) Dinamika hubungan internasional adalah anarki, yang berarti tiadanya sebuah otoritas kedaulatan pusat yang mengatur hubungan antar negara; (iv) Konflik merupakan realitas yang selalu ada dalam hubungan internasional yang dipenuhi niat agresif dari berbagai negara; (v) Kesamarataan tatanan dan keamanan bisa dipelihara dengan membentuk aliansi antar negara yang mencegah adanya negara adikuasa yang mengancam perdamaian; (vi) Institusi-institusi dan hukum internasional memainkan peran penting dalam hubungan internasional, namun hanya efektif jika didukung oleh kekuatan atau sanksi yang efektif.

Perspektif realisme membahas kajian Hubungan Internasional dari sudut pandang negara sebagai aktor utama dalam menjalankan dinamika hubungan internasional. Ciri utama negara modern adalah bahwa negara mempunyai wilayah yang jelas, sebuah pemerintahan yang diberi otoritas kedaulatan serta pelaksanaan kekuasaan terhadap rakyat. Paradigm realisme melihat ciri utama dari sebuah negara ialah kedaulatan<sup>21</sup>. Dalam kaitannya dengan negara, terdapat dua jenis kedaulatan: kedaulatan internal yang merupakan penyelenggaraan otoritas di dalam sebuah wilayah negara terhadap warga negaranya, dan; kedaulatan eksternal yang meliputi negara-negara lain sebagai pihak yang sah yang bertindak bebas di dalam urusan-urusan internasional, semisal membangun aliansi.

Tema utama kedua dalam perspektif realisme dalam Hubungan Internasional adalah kekuasaan. Kekuasaan dalam perspektif realisme dianggap sebagai konsep

---

<sup>21</sup> Jill Steans dan Lloyd Pettiford, “Dinamika Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema”, ter. Deasy Silvy Sari, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2009)

persaingan. Esensi kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah tingkah laku atau untuk mendominasi. Beberapa pemikir realisme memaknai kekuasaan dalam istilah *zero-sum game*.<sup>22</sup> *Zero-sum game* merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan situasi dimana kemenangan yang didapat oleh pihak tertentu merupakan kekalahan bagi pihak lain, atau secara sederhana dimaknai *winners take all*.

Hal ini menciptakan kondisi politik kekuasaan yang merupakan inti dari realisme Morgenthau. Politik merupakan perjuangan untuk kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara, dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik aksi politik.<sup>23</sup> Di sini Morgenthau menekankan bahwa untuk mendapatkan wilayah politik yang terbebas dari dari intervensi atau kendali pihak asing, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka untuk tujuan tersebut, serta pembenaran ancaman dan penggunaan kekuatan. Sebab etika politik memperbolehkan sebagian tindakan yang tidak akan diterima oleh moralitas pribadi.

Konsep realis berfokus pada perilaku negara sebagai aktor yang mementingkan kepentingannya sendiri, memiliki kedaulatan dan kekuasaan serta dimotivasi oleh kepentingan nasionalnya, akan digunakan oleh penulis dalam menjabarkan perumusan kebijakan penumpasan *illegal fishing* oleh Indonesia. Konflik tersebut akan diatasi dengan tindakan yang menggunakan kekuasaan serta

---

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> Hans Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, “*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*”, A.A. Knopf, New York. (1965)

memanfaatkan kedaulatan Indonesia dalam memerangi *illegal fishing*, demi mencapai dan memenuhi kepentingan negara.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. metode deskriptif sendiri merupakan metode pengolahan data yang dijelaskan dengan menyajikan serta menganalisa data dan fakta, untuk dapat memudahkan dalam mencapai pemahaman akan suatu hal. Hasil analisa tersebut nantinya akan disajikan secara sistematis sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Sementara metode penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang menjelaskan data dan fakta yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan analitis. diharapkan mampu mengeksplorasi keadaan manusia atau suatu fenomena sosial.<sup>24</sup> Peneliti akan membentuk suatu wujud gambaran yang holistic, melalui analisis pendapat, membuat laporan pandangan dari informan, serta menjalankan prosedur kajian ilmiah.<sup>25</sup>

Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan serta menganalisis objek berupa kelompok manusia, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang telah terjadi. Dengan demikian, fakta-fakta dapat dikaji lebih lanjut sesuai teori teori yang berlaku agar persoalan atau masalah dapat dijelaskan secara rinci.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>John W. Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc., 15.

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 57

### **1.8.2. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada kebijakan dan ketahanan maritim Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo yang berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu keamanan dan perkembangan maritim Indonesia. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada isu keamanan maritim serta penerapan kebijakan baru di bawah administrasi Jokowi dalam menanggulangi permasalahan kelautan Indonesia.

Secara spesifik, terdapat 2 hal yang akan dibahas secara mendalam melalui penelitian ini. Pertama ialah penerapan kebijakan luar negeri yang menempatkan Jakarta sebagai pusat dari *Global Maritime Nexus*. Di mana, isu yang berusaha ditanggulangi yaitu permasalahan kelautan terutama pencurian ikan (*illegal fishing*), perompakan, pembajakan, dan pencurian di kawasan Asia Tenggara. Kedua, juga akan dibahas mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan kebijakan tersebut di bawah Menteri Susi Pudjiastuti serta dampaknya terhadap hubungan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

### **1.8.3. Unit Analisa dan Tingkat Analisa**

Dalam setiap bidang keilmuan, selalu terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang dipelajari demi analisa yang sistematis.<sup>27</sup> Sasaran analisa yang tepat dan sistematis harus memilih dari berbagai kemungkinan tingkat analisa. Maka dalam menentukan tingkat analisa, kita terlebih dahulu menetapkan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa adalah unit pelaku yang hendak

---

<sup>27</sup> Singer, J David, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, Vol 14, No. 1 (Oktober 1961)

dideskripsikan, dalam penelitian ini pelaku yang akan dijelaskan ialah Indonesia yang menerapkan kebijakan luar negeri poros maritim. Sedangkan unit eksplanasi adalah dampak yang terhadap unit analisa yang hendak diamati.<sup>28</sup>

Tingkat analisa dari penelitian ini adalah regional, yakni wilayah kelautan dan kawasan Asia Tenggara. Asumsinya adalah implikasi dari penerapan kebijakan poros maritim Jokowi tidak hanya berpengaruh pada keamanan Indonesia, namun juga mempengaruhi negara-negara dan aktor-aktor lainnya di kawasan. Hubungan Internasional, bagaimanapun menuntut negara-negara untuk menjalankan kekuasaan dengan memperhatikan dampaknya kepada kawasan dan dunia pada umumnya, yang mendorong mereka membentuk pengelompokan.<sup>29</sup>

#### **1.8.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif ialah metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) serta studi dokumen. Studi pustaka merupakan teknik penelitian yang memperoleh dan mengolah data serta fakta sejarah melalui buku referensi literatur, artikel, arsip, dokumen, jurnal, serta surat kabaryang tersimpan dalam perpustakaan yang mendukung.<sup>30</sup> Data yang diperlukan akan dikumpulkan dan dirangkum melalui studi pustaka. Penulis akan melakukan analisis data yang relevan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penulis akan memperoleh data sekunder melalui analisis jurnal, buku, artikel, internet, serta referensi tertulis lainnya.

---

<sup>28</sup> Mas'ood, Mohtar, "Ilmu Hubungan Internasional – Displin dan Metodologi", LP3ES, Yogyakarta, (1990), 39

<sup>29</sup> *Ibid*, 47

<sup>30</sup> Prof. Dr, Koentjaraningrat, "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Jakarta: PT Gramedia, 1997. 64

### 1.8.5. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan disusun, dianalisa, kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang berdasarkan fakta dan data yang terkumpul dari penelitian. Apabila data serta informasi yang dirangkum dirasa telah cukup memadai untuk mendukung proses analisa, maka dilanjutkan pada proses analisa data. Analisa data yaitu proses penyederhanaan data agar menjadi mudah dibaca dan dipahami, sehingga dapat disajikan secara jelas dan dipahami dengan baik oleh kalangan akademis maupun non-akademis. Manfaat dari analisis data adalah menyajikan data secara sistematis, terfokus dan jelas, sehingga observasi yang dilakukan menjadi lebih fokus dan pengembangan teori yang diungkapkan semakin jelas.<sup>31</sup>

Analisa data deskriptif kualitatif merupakan analisis yang tidak menerapkan pengkajian statistik dan matematik, tapi menerangkan permasalahan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dan kemudian disusun dalam bentuk tulisan deskriptif. Data berupa angka dan statistik bukan menjadi data primer, namun bertugas sebagai penunjang dan pelengkap dari fakta yang dijelaskan dalam penelitian.

---

<sup>31</sup> A. Chaeder Waasilah, *Op*, 158.



## **1.9. Sistematika Penulisan**

### **(1) BAB 1 : Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuuan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

### **(2) BAB 2 : Fenomena *IUU Fishing* di Wilayah Kelautan Indonesia**

Bab ini membahas mengenai fenomena *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia serta akotr aktor yang teribat di dalamnya.

### **(3) BAB 3 :Perumusan Kebijakan Anti *IUU FISHING***

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk bentuk kebijakan Joko Widodo dalam menumpas *IUU fishing* sesuai dengan visi Indonesia dalam menjadi negara poros maritime dunia.

### **(4) BAB 4: Analisa Kebijakan anti *IUU Fishing* pada Era Joko Widodo**

Bab ini menjelaskan analisa kebijakan penumpasan *IUU fishing* pada era Joko Widodo yang dilihat dari kacamata konsep dan teori yang digunakan. Fokus pada bab ini adalah menganalisa mengenai kaitan *IUU fishing* dengan visi maritim Indonesia serta menjawab pertanyaan mengenai rumusan kebijakan Joko Widodo.

### **(5) BAB 5 : Penutup**

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.